# BAB

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi penyaluran bantuan sosial kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Panakkukang , Kota Makassar, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

### 1. Proses Pengusulan Bantuan

Proses pengusulan bantuan dilakukan secara berjenjang dari kelompok usaha ke pemerintah daerah hingga ke Dinas Sosial Provinsi. Proses ini cukup partisipatif karena kelompok diminta menyusun rencana usaha sesuai kebutuhan lapangan. Namun, masih terdapat beberapa kelompok yang belum memahami secara teknis penyusunan usulan, sehingga usulan yang diajukan kadang tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan usahanya.

### 2. Pengadaan Bantuan

Proses pengadaan bantuan dilakukan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi bersama Pokja Pengadaan Barang dan Jasa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Bantuan diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan usulan kelompok yang telah diverifikasi dan divalidasi. Meskipun mekanisme ini menjaga transparansi dan akuntabilitas, prosesnya cenderung memerlukan waktu yang lama karena harus melalui tahapan administrasi yang

kompleks, yang berdampak pada keterlambatan penyaluran bantuannya.

3. **Penerima Sesuai dengan Kriteria yang Ditetapkan**

   Penerima bantuan telah melalui proses seleksi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan survei lapangan oleh pendamping sosial. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penerima telah memenuhi kriteria fakir miskin. Tetapi masih terdapat tantangan khususnya dalam menjangkau kelompok yang belum terdata dalam DTKS meskipun memiliki potensi dan keinginan untuk berusaha secara mandiri.

4. **Mekanisme Penyaluran Bantuan**

   Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung melalui serah terima barang kepada ketua kelompok dan anggotanya, bukan dalam bentuk uang tunai. Mekanisme ini dinilai lebih efektif dalam menghindari penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari pengembangan usaha masing-masing kelompok. Kelompok mengelola bantuan secara kolektif berdasarkan kesepakatan bersama, dengan pembagian tugas dan sistem pengelolaan keuangan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan telah mendorong semangat kebersamaan dan tanggung jawab kelompok.

5. **Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan**

   Pengawasan dilakukan melalui pendamping sosial yang bertugas memantau penggunaan bantuan dan perkembangan usaha.

Evaluasi dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan, laporan kegiatan, dan dokumentasi visual. Walaupun sistem pengawasan ini sudah berjalan, keterbatasan jumlah pendamping sosial masih menjadi kendala dalam pemantauan yang intensif terhadap seluruh kelompok penerima.

Secara keseluruhan, implementasi penyaluran bantuan sosial KUBE di Kecamatan Panakkukang berjalan cukup efektif. Bantuan yang diberikan tidak hanya mendorong peningkatan kapasitas usaha kelompok, tetapi juga memacu kemandirian dan semangat wirausaha di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, penyempurnaan dari sisi teknis, penguatan kapasitas, dan efisiensi pelaksanaan masih diperlukan agar program ini semakin optimal dan berkelanjutan.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program bantuan sosial KUBE adalah **Peningkatan Kapasitas Kelompok dalam Penyusunan Usulan.**

Dinas Sosial bersama pemerintah setempat perlu memberikan pelatihan teknis dalam penyusunan proposal usaha kepada kelompok masyarakat calon penerima bantuan. Hal ini penting agar bantuan yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan usaha dan lebih mudah diproses secara administratif.

Dengan perbaikan diberbagai aspek tersebut, diharapkan pelaksanaan bantuan sosial KUBE tidak hanya menjadi program jangka pendek, melainkan menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap penanggulangan kemiskinan.

## C. Produk Tesis

Keluaran dari tesis ini adalah sebuah Telahaan Staf **"Optimalisasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Provinsi Sulawesi Selatan"**

Diharapkan adanya penyempunaan kebijakan terkait dengan pelaksanaan program KUBE khususnya dalam pendampingan lanjutan untuk mendukung keberhasilan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Karena bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan kepada kelompok KUBE dan bukanlah akhir dari intervensi pemerintah, melainkan titik awal dari proses pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui pendampingan lanjutan yang berkualitas, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dapat memperkuat kapasitas KUBE dalam hal manajemen usaha, akses pasar, pencatatan keuangan, hingga pemanfaatan teknologi digital. Karena pendampingan lanjutan memiliki peran sentral dalam mendukung keberhasilan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan kepada kelompok KUBE dan bukanlah akhir dari intervensi pemerintah, melainkan titik awal dari proses pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, investasi dalam peningkatan kualitas pendampingan khususnya lanjutan kepada penerima bantuan KUBE, perlu menjadi prioritas strategis Dinas Sosial. Dengan pendamping yang kompeten dan responsif terhadap kebutuhan lapangan, program KUBE dapat berkembang lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Pendampingan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian integral dari proses pemberdayaan sosial yang harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.